

Efektivitas Penataan Administrasi Pemerintah Gampong Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie

Arifatullah⁽¹⁾ Edi Gunawan⁽²⁾ Aris Munandar⁽³⁾
(1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Universitas Serambi Mekkah
Email: ariff@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of, among other things, to find out how far the orderly arrangement of Gampong Government administration in realizing public services has been running and what obstacles are encountered in these public services. In this research using descriptive method. To obtain data it is necessary to carry out field research and library research. All data obtained was processed and analyzed using a qualitative approach.

The results of the research show that the orderly administration of data collection in the effort to provide public services carried out by the Gampong Government in Gampong Teubeng Dayah, Pidie District, Pidie Regency has not been carried out as it should. Obstacles encountered include the limited ability of the Gampong apparatus to organize the administration of public services and the limited facilities and infrastructure owned by the Gampong government. It is suggested that in selecting the Keuchik/Gampong officials, educational background and other requirements should be considered. Facilities and infrastructure that do not yet exist need to be completed immediately so that the services provided are maximized.

Keywords : *Effectiveness, Government Administration,*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh data perlu melaksanakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Semua data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan tertib administrasi dalam upaya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie belum terselenggara sebagaimana mestinya. Hambatan yang ditemui antara lain adalah terbatasnya kemampuan Perangkat Gampong dalam menata tertib administrasi terhadap pelayanan publik dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong. Disarankan supaya dalam pemilihan Keuchik/Perangkat Gampong perlu diperhatikan latar belakang pendidikan dan syarat lainnya, sarana dan prasarana yang belum ada perlu dilengkapi segera agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal organisasi. Oleh karena itu, jika penerapan sistem komputerisasi diterapkan dengan baik maka efektivitas kerja akan tercapai.

Kata Kunci: *Efektivitas, Administrasi, Pemerintahan, Gampong,*

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengubah system penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang kehutanan, kelautan dan sumberdaya mineral, sedangkan urusan pendidikan pengelolaan pendidikan menengah dan khususnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penjelasan Qanun Nomor. 8 Tahun 2011 telah ditegaskan bahwa Gampong mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam artian mempunyai hak otonomi untuk mengurus urusan rumah tangga Gampong. Dimana untuk menjalankan roda organisasi Pemerintah Gampong itu sendiri dalam rangka penyelenggaraan hal otonomi Gampong. Ini diperlukan adanya suatu lembaga Pemerintahan Gampong yang dibentuk dan berkedudukan secara resmi, dengan kata lain ia mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Tugas Gampong sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong disebutkan bahwa, Pemerintah Gampong mempunyai tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan secara otonomi, dan melaksanakan pembangunan, melestarikan adat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam di Gampong tersebut. Keuchik merupakan hakim perdamaian bagi Gampongnya yang dibantu oleh Imum Meunasah dan Tuha Peut Gampong, Jika ada pihak- pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian dapat meneruskan kepada Imum Mukim dan Keputusan Imum Mukimlah yang bersifat akhir dari permasalahan yang

dihadapi masyarakat tersebut dan keputusan sangat mengikat, dari semua keputusan yang diputuskan sebelumnya.

Perangkat Gampong dapat membantu Keuchik untuk melaksanakan, menyelesaikan dan serta menyelenggarakan terhadap fungsi, tugas serta kewajibannya sebagaimana Kepala Pemerintahan Gampong. Perangkat Gampong terdiri dari unsur- unsur staf yaitu Sekretaris Gampong yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh beberapa orang staf seperti Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Keistimewaan Aceh serta Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan sementara yang telah penulis kemukakan diatas tersebut dan disertai juga penelitian yang dilaksanakan penulis di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, adalah memperlihatkan bahwa Pendataan Tertib Administrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, guna untuk dalam mewujudkan pelayanan publik belumlah sepenuhnya dapat berhasil dikarenakan dijumpai berbagai faktor kendala atau hambatan yang terjadi.

Beranjak dari penjelasan yang telah disajikan dalam latar belakang permasalahan, maka disini peneliti mencoba merumuskan permasalahan yaitu:

- a. Sejauhmana efektivitas penataan tertib administrasi Pemerintah Gampong telah dilaksanakan dalam mewujudkan pelayanan publik di Gampong Teubeng dayah Kecamatan Pidie.
- b. Hambatan apa saja yang ditemui sehingga pendataan tertib administrasi Pemerintah Gampong dalam mewujudkan pelayanan publik belum terlaksana secara maksimal?

2. Kajian Pustaka

Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut pendapat Hidayat (2013:29) yang

menjelaskan bahwa: 'Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya. Menurut Ravianto (2014:11) Pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Gibson et.a Bungkaes (2013:46) Pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan "standar" maka mereka dinilai semakin efektif. Sedangkan pengertian efektivitas menurut pendapat Scheneerthon John (2014:132) adalah sebagai berikut: Efektivitas adalah pencapaian target yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif. Adapun pengertian efektivitas menurut pendapat Orasetio Saksono (2014:203) adalah: "Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Menurut Jogyanto (2015:1) "Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu." Jadi kesimpulan dari sistem dapat ditarik dari beberapa pengertian sistem diatas yaitu sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Komputerisasi: adalah rangkaian alat elektronik yang dapat melakukan pekerjaan

secara sistematis, berdasarkan instruksi program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bilamana diperlukan. Pada dasarnya, komputer merupakan suatu alat yang akan salah fungsi jika tidak dipergunakan dengan benar, walaupun kesalahan dapat juga bersumber pada alat tersebut. Penggunaan atau penerapan teknologi komputer dalam pekerjaan kantor adalah merupakan tuntutan dan kewajiban yang dibutuhkan, walaupun tanpa menghilangkan sistem manual tangan atau manual. Penggunaan komputer dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai dalam rangka menunjang kegiatan dalam suatu instansi perkantoran.

Model umum sebuah sistem terdiri dari *input*, proses, dan *output*. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. Selain itu sebuah sistem juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Pembicaraan sekitar efektivitas kerja pegawai adalah: sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan, dan pasti akan berkaitan dengan banyak faktor. Jika dikatakan bahwa efektivitas kerja pegawai merupakan sikap atau kondisi umum seseorang yang positif terhadap kehidupan organisasionalnya, maka jelaslah bahwa setiap pemimpin perlu mengambil berbagai langkah agar semakin banyak (apabila mungkin semua) bawahannya merasa puas dan selalu bersemangat dalam bekerja, yang pada saatnya nanti akan mencapai tingkat efektivitas kerja pegawai yang bersangkutan sesuai yang diharapkan. Menurut Siswanto (2017:55) dalam bukunya pengantar manajemen mengemukakan bahwa efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Manajer yang efektif adalah manajer yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan.

3. Metodologi Penelitian

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif atau dengan maksud menggambarkan gambaran keadaan sampel secara nyata atau menampilkan sampel secara aktual dan cermat, pendekatan yang digunakan untuk menganalisa jawaban pertanyaan adalah gabungan pendekatan kualitatif.

4. Pembahasan

a. Efektivitas Penataan Tertib Administrasi Pemerintah Gampong dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie

Gampong Teubeng Dayah merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Teubeng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang berjarak 4,5 km dari pusat kecamatan dan pusat Kota Sigli. Menurut Petua Gampong Penamaan Gampong Dataran Teubeng berawal dari seorang ustad yang membangun tempat pengajian yang disebut dayah

Luas Gampong Dayah Teubeng lebih kurang 43,86 ha yang terbagi dalam 4 (empat) dusun yaitu :

- Dusun Bahagia
- Dusun Sejahtera
- Dusun Melur dan
- Dusun Jempa

Jumlah penduduk Gampong Teubeng Dayah 740 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga/KK 234. Mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya pedagang dan pegawai kantor pemerintah serta TNI/POLRI. Secara geografis Gampong Dayah Teubeng termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 10 meter dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Gampong Dayah Teubeng adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Tanjong Teubeng dan Gampong Labui
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Bayu Teubeng dan Gampong Jawa

Teubeng

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Dalueng dan Gampong Jawa Teubeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Cot Teubeng dan Gampong Cot Rheng

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya Gampong Teubeng memiliki wilayah lebih kurang, 43,86 Ha dari hasil pemetaan yang pernah dilakukan untuk lebih jelas mengenai luas tanah dan penggunaannya dapat dikemukakan berikut ini:

1. Luas pemukiman 10,56
2. Luas persawahan 28,5
3. Luas perkebunan 10,56

Dalam konteks peningkatan pendapatan masyarakat Gampong Teubeng Dayah dapat memungkinkan bagi pengembangan dan peningkatan usaha yang menggunakan areal yang luas di bidang Pertanian dan Perkebunan. Masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri dan sektor lainnya tidak dominan, ini mengartikan bahwa sebagai besar warga masyarakat Gampong Teubeng Dayah, lebih mengandalkan sebagai Petani dan Perkebunan. Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk pembaharuan, dengan adanya berbagai pembangunan yang dilakukan di suatu daerah diharapkan Daerah tersebut akan lebih maju dan berkembang. Penataan tertib administrasi Pemerintah Gampong dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian antara lain adalah : Administrasi Keuangan Gampong Penataan administrasi keuangan perlu ditata sedemikian rupa agar setiap ada penerimaan dan pengeluaran dana Gampong dapat diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan. Setiap ada penerimaan baik dari Pemerintah Atasan maupun dana dari swadaya masyarakat dikelola oleh bendaharawan Gampong, dana tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Administrasi Materiil, Penataan administrasi materiil merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Gampong gunanya untuk mengetahui jumlah Inventaris/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong tersebut baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Administrasi Pemerintahan

Gampong Teubeng Dayah, Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintahan Gampong Teubeng Dayah khususnya dalam bidang administrasi umum, administrasi kependudukan, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong Teubeng Dayah.

Pelayanan administrasi umum menyangkut dengan pembuatan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar. Keputusan Gampong merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Gampong, dalam hal ini Keuchik selaku pimpinan Gampong berhak untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak pernah dibuat dalam keputusan Gampong secara tertulis. Sedangkan keputusan Gampong dilakukan untuk kepentingan penyaluran dana pembangunan Gampong yang berasal dari Pemerintahan atasan, hal ini dibuat oleh Kepala Urusan atau Kepala seksi pembangunan Gampong pada Pemerintahan Tingkat Kecamatan atas persetujuan Pemerintahan Gampong. Maksud tersebut adalah untuk memperlancar penyaluran dana pembangunan Gampong. Sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan pelayanan administrasi pada Biokrasi Pemerintahan Gampong Teubeng Dayah kurang berjalan sebagai mana mestinya karena diperoleh keterangan bahwa keputusan Gampong tidak dilakukan secara tertulis oleh Pemerintah Gampong. Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada pelayanan administrasi tentang kekayaan

Gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan Gampong tidak dibukukan secara konsisten karena Pemerintahan Gampong yang mengerjakan buku kekayaan Gampong misalnya tanah sawah, tanah kebun dan lain-lain yang maksudnya berstatus pemilikan secara hukum tradisional sehingga tidak ada penginventarisir dalam buku kekayaan Gampong yang dimaksud. Berkenaan dengan surat menyurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong, Keuchik Gampong selalu mengeluarkan surat yang berhubungan dengan berbagai kepentingan masyarakat seperti memberikan surat keterangan dan surat-surat lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan administrasi Pemerintahan berkenaan dengan administrasi kependudukan Pemerintah Gampong perlu membuat buku induk penduduk, buku penduduk sementara, buku perubahan penduduk, buku perkembangan penduduk, buku kartu keluarga, dan buku jumlah penduduk. Buku induk penduduk adalah buku yang memuat identitas penduduk yang dikerjakan oleh Pemerintahan Gampong dalam rangka pelayanan administrasi penduduk.

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa pelayanan administrasi bidang kependudukan di Gampong Teubeng Dayah telah dilakukan oleh Pemerintahan Gampong, meskipun penataan administrasi tersebut belum sepenuhnya sempurna

5. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Beranjak kepada uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka di sini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1. Efektivitas Penataan Terti Administrasi Pemerintah Gampong dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, belum terlaksana sebagaimana mestinya, dikarenakan

- dijumpai berbagai faktor penghambat,
2. Hambatan yang dijumpai antara lain adalah Pemerintah Gampong kurang cakap dalam menata administrasi untuk pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, sesuai dengan kenyataan yang diperoleh Pemerintah Gampong tidak pernah dibekali dengan pelatihan-pelatihan tentang administrasi Gampong sehingga pelayanan yang diberikan kurang mencapai sasaran,

Pelayanan, Rajawali press: Jakarta
The Liang Gie (2013), *Organisasi dan Manajemen Kantor*, Perct. Ref Medan
Wayong (2012) *Fungsi Administrasi Negara*, Djambatan: Jakarta

Saran-Saran

1. Disarankan Disarankan supaya Pemerintah atasan dalam Pemilihan Perangkat Gampong lebih memperhatikan latar belakang pendidikan dan memberikan pelatihan-pelatihan tentang administrasi gampong karena faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan pelayanan public.
2. Disarankan hendaknya disetiap Gampong Kantor Keuchik Perlu diaktifkan supaya penataan administrasi dalam rangka pelayanan publik dapat terlaksana secara kontinue dan terorganisir serta sistematis dan perlu pengadaan komputer.

Daftar Pustaka

- Baratha, I, Nyoman (2012), *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hoesein Bhenyamin (2012) *Manajemen pelayanan Umum*, Bumi Aksara: Jakarta
- Lehtinen (2013), *Strategi pelayanan Prima*, Bina Aksara: Jakarta
- Risdianyanti (2013) *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam permbangunan*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Sarwoto (2012) *Fungsi Administrasi Negara*, Bina Aksara: Jakarta
- Norman (2013) *Pelayanan Prima di Sektor Publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Osborn dan Gaebler (2014) *Reinventing Government*
- Tjiptono (2013) *Model dan Kualitas*